

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Djohermansyah Djohan, 2007, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat ditingkat Lokal, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga.
- HAW Widjaja, 1993, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Inu Kencana Syafii, 2013, Ilmu Pemerintahan, Semarang, Bumi Aksara.
- Iswan Kaputra, Amrin Banjarnahor, Armasyah Matondang, dkk, 2013, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- J. Kaloh, 2003, Kepala Daerah Pola Kegiatan, kekuasaan, dan perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, 2003, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Mangku Purnomo, 2004, Pembaruan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2016, Hukum Pemerintahan Desa, Malang, Setara Press.
- Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nyoman Beratha, 1982, Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Mazuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.

- R.H. Unang Sunardjo. 1984. Tinjauan Sepintas tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung, Tarsito.
- Sabtoni, Anang, dkk, 2005, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, Yogyakarta, IRE Press.
- Samsul Wahidin, 2013, Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- Saparin, 1979, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sirojul Munir, 2013, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya, Yogyakarta, Gentha.
- Sjafrizal, 2014, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, Padang, Rajawali Pers.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, Desa, Jakarta, PN Balai Pustaka.
- Sutoro Eko, 2004, Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, APMD Press.
- Suwignjo, 1985, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Syahla Guruh L.S, 2000, Menimbang Otonomi vs federal, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Syaukani HR, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, 2002, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Totok Mardikanto, Poewoko Soebianto, 2013, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.
- Yusnani Hasyimzoem, M.Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, 2017, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta, Rajawali Pers.

### **Internet**

- <http://ppid.klatenkab.go.id/web/pagu-alokasi-dana-desa-add-dan-dana-desa-dd-kabupaten-klaten-tahun-2016/> (diakses pada Rabu, 15 November 2017 pukul 8.23)
- <http://ppid.klatenkab.go.id/web/wpcontent/uploads/2015/07/Lampiran%20perbup%2010.pdf> (diakses pada Rabu, 15 November 2017 pukul 8.34)

<https://wakhinuddin.wordpress.com/2010/06/11/perbedaan-monitoring-dan-evaluasi/> (diakses pada Minggu, 10 Desember 2017 pukul 20.26)

<http://www.beritabandabaro.com/2016/11/beda-dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa.html> (diakses pada Senin, 11 Desember 2017 pukul 01.24)

<http://www.keuandangesa.info/2015/12/asas-pengelolaan-keuangan-desa.html> (diakses pada Senin, 11 Desember 2017 pukul 01.30)

## **Jurnal**

Afriniko, 2015, “ Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”, JOM Fakultas Hukum, Vol 2 No 2

Arifudin Mas’ud, Safarudin, dan Faiziah, 2017, “Persepsi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No 2

Edy Supriadi, 2015, “Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal Ius, Vol 3 No 2

Indah, 2014, “Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol 9 No 2

Innesa Destifani, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie, 2010, “Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa”, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No 6

Moh Amad Safri, Andi Mattulada Amir dan Nina Yusnita, 2017, “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintahan Desa di Kabupaten Buol”, Jurnal Katalogis, Vol 5 No 9

Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, Jurnal Penelitian Politik, Vol 13 No 2

Ombi Romli, 2017, “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa” Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 No 1

Revina Riana, Retno Saraswati, Fifiana Wisnaeni, 2017, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No 2

Sakinah Nadir, 2013, “ Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa” Jurnal Politik Profetik, Vol 1 No 1

Yusnani Hasjimzoem, 2014, “ Dinamika Hukum Pemerintahan Desa” Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No 3

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2017;

Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;dan

Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.